PERAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA GORONTALO TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA GORONTALO

Mirnawati Umar[1], Apris Ara Tilome[2], Joice Machmud[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
mirnawatiU@gmail.com

ABSTRACT

MIRNAWATI UMAR. The Role of the Social Service and Community Empowerment of Gorontalo City towards Persons with Disabilities in Gorontalo. Supervised by APRIS ARA TILOME as Chairman and JOICE MACHMUD as Member

This research aims to determine the role of the Gorontalo City Social and Community Empowerment Service for persons with disabilities in Gorontalo City. The method used in this research is descriptive qualitative. The results showed that the role of the Gorontalo City Social Service as a facilitator was quite good. This is due to the efforts made by the Social Service in providing assistance to persons with disabilities in short-term assistance such as cash and basic necessities as well as long-term assistance such as including persons with disabilities in self-reliance training activities. The role of the Gorontalo City Social Service as an educator is quite good as well. This can be seen from the efforts that have been made such as providing skills training for persons with disabilities, although the frequency is still low. The role of the Gorontalo City Social Service as a reference is allso considered as quite good. This is due to the efforts made by the Social Service in obtaining assistance from outside parties such as business capital assistance, supporting equipment (wheelchairs), job opportunities, and assistance in the form of basic necessities.

Keywords; Role of Social Service, Persons with Disabilities

ABSTRAK

MIRNAWATI UMAR. Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Gorontalo. Dibimbing oleh APRIS ARA TILOME sebagai Ketua dan JOICE MACHMUD sebagai Anggota

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo terhadap penyandang disabilitas di Kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial Kota Gorontalo sebagai fasilitator sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas baik dalam bantuan yang bersifat jangka pendek seperti uang tunai dan sembako maupun bantuan yang bersifat jangka panjang seperti mengikutkan penyandang disabilitas dalam kegiatan pelatihan kemandirian. Peran Dinas Sosial Kota Gorontalo sebagai edukator sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan seperti mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas meskipun secara frekuensi masih rendah. Peran Dinas Sosial Kota Gorontalo sebagai refrsentasional sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mendapatkan bantuan dari pihak luar seperti bantuan modal usaha, peralatan pembantu (kursi roda), kesempatan kerja, maupun bantuan berupa sembako.

Kata Kunci; Peran Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN.

Penyandang disabilitas adalah salah satu masalah dalam kesejahteraan sosial, dimana para penyangandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan teratur. Penyandang disabilitas pada umumnya mengalami kesulitan dalam mobilitas saat melakukan aktivitas sehari- hari apabila dibandingkan dengan orang- orang yang normal. Secara fisik, penyandang disabilitas mengalami kendala saat menggerakkan tubuhnya secara optimal. Para penyandang disabilitas secara tidak langsung mereka mengalami rasa tidak percaya diri dan akan kesulitan dalam menyesuaikan diri dimasyarakat, karena perlakukan masyarakat atau lingkungan sekitar banyak yang melihat mereka dengan sebelah mata dan sebagian dari mereka memberi celaan atau belas kasihan ketika memandang mereka (Suharto, 2006).

Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya. (Poerwoko dan Totok, 2012)

Hak-hak penyandang disabilitas ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Dasar No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun realitanya menunjukkan kondisi sebaliknya, pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka, mereka pun dipersulit dengan aksesibilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama dan ketersediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas yang masih terbilang minim.

Adanya anggapan juga bahwa disabilitas merupakan aib, memalukan, membuat pihak keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki keterbatasan. Penyandang disabilitasakan disamakan dengan orang sakit dan

tidak berdaya, sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Para penyandang disabilitas cukup hanya dikasihani dan dirawat untuk kelangsungan hidupnya. Ruang untuk mendapatkan ilmu atau keterampilan bagi penyandang disabilitas pun masih minim. Masyarakat juga masih menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang- orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, membutuhkan bantuan dalam segala hal. Dunia kerja pun, sebagian besar masyarakat masih menganggap sebelah mata kemampuan penyandang disabilitas. Jelas sekali persepsi ini adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terlihat juga dari persyaratan dalam bidang pendidikan serta persyaratan utama seleksi kerja yang mengharuskan murid dan karyawannya sehat jasmani, rohani, mental atau dengan kata lain tidak diperbolehkan cacat karena berkaitan dengan kinerjanya selama masa pendidikan. Kebanyakan dalam dunia kerja dan pendidikan enggan untuk menerima seorang penyandang disabilitas sebagai karyawan dan siswa. Masyarakat berasumsi bahwa seorang penyandang disabilitas tidak akan mampu melakukan pekerjaan seefektif seperti karyawan lain yang bukan penyandang disabilitas. Sehingga bagi para penyedia lapangan pekerjaan, memberikan pekerjaan untuk para penyandang disabilitas sama halnya dengan mendorong perusahaan dalam jurang kebangkrutan karena harus rela menyediakan beberapa alat-alat bantu bagi kemudahan para penyandang disabilitas dalam menunjang aktivitasnya.

Permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak hanya sebatas “pelabelan” sebagai kaum yang berbeda sehubungan dengan kondisi jasmani yang disandangnya namun juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang dihadapinya. Para penyandang disabilitas di Kota Gorontalo khususnya masih menghadapi tantangan dalam memperoleh haknya. Selama ini hak para penyandang disabilitas belum secara khusus diperhatikan. Urusan kehidupan bermasyarakat pun pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga belum memberikan ruang untuk menerima dan memahami arti dari keberadaan para penyandang disabilitas. Pada hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah bagi penyandang disabilitas saat ini masih terbatas. Beberapa sarana umum yang dibangun dengan mempertimbangkan kaum disabilitas bahkan pada pelaksanaannya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan bagi penyandang disabilitas.

Dari hasil observasi penulis menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Gorontalo belum

maksimal, hal ini terlihat dari bentuk pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial yang berupa bantuan uang tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas. Belum ada upaya dari Dinas Sosial dalam menciptakan peraturan atau regulasi khusus yang memberikan akses kepada penyandang disabilitas untuk bisa memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Kurangnya motivasi yang diberikan oleh Dinas Sosial menjadikan para penyandang disabilitas merasa termarjinalkan dari masyarakat luas. Secara umum, penyandang disabilitas merasa malu, minder dan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bergaul dan bekerja. Selain itu, fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial juga kurang membantu para penyandang disabilitas untuk keluar dari permasalah mental maupun ekonomi. Pemberian bantuan dalam bentuk uang dianggap kurang efektif, dibutuhkan bantuan yang lebih bersifat stimulan untuk membantu para penyandang disabilitas keluar dari permasalahannya.

Dari ketidakberdayaan yang dialami penyandang disabilitas di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki masa-masa yang sulit dalam hidupnya sehingga seringkali membuat mereka putus asa dan enggan untuk mulai bersikap produktif. Dinas Sosial selaku dinas yang menaunginya harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di Kota Gorontalo terutama, serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas itu sendiri. (Suhartini, 2011)

Penelitian tentang peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas sebelumnya dilakukan oleh Oca Pawalin, 2017 dengan judul penelitian “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa peran Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, peran representative dan peran teknis telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal. Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penulis lebih melakukan pendalaman terhadap indikator yang digunakan untuk mengukur sejauhmana peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam menjaga keberlangsungan hidup

dari para penyandang disabilitas baik penyandang non produktif maupun yang masih produktif.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2013); penelitian deskriptif adalah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan dan dilakukan oleh informan atau sumber data, dan bersifat *"perspektif emic"* artinya data yang diperoleh bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan gejala sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh informan/partisipan (Kurniawan, 2012)

Dengan melihat penggunaan pendekatan dan jenis penelitian dalam penelitian ini, maka adapun kehadiran peneliti yaitu sebagai instrumen utama yang harus berbaur dengan lingkungan penelitian. Dalam hal ini, peneliti langsung menelaah dan menganalisa sumber data terkait dengan permasalahan penelitian sehingga hasil penyusunan penelitian nantinya akan menjadi akurat. Kehadiran peneliti sendiri dilokasi penelitian diawali dengan melakukan rancangan penelitian dan melakukan pemilihan lokasi sebagai objek sebagai lokus yang memiliki permasalahan.

Sarwono (2006) Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu primer dan sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; observasi, wawancara, dan dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlukan untuk menjalankan

tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial. Dinas Sosial dalam hal ini merupakan perangkat daerah Kota Gorontalo yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam pembinaan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pembinaan tenaga kerja. Selain itu juga menurut Peraturan Daerah Kota Gorontalo Bab VI bagian Koordinasi dan Pelaksanaan No. 13 Tahun 2016 pasal 83 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas yang menjadi dasar bahwa Dinas Sosial harus mampu memenuhi perannya selaku dinas yang tugas dan fungsinya pada bidang sosial.

Dinas Sosial menjalankan fungsi pelaksanaan, usaha penyantunan, pembinaan, pelatihan dalam rangka meningkatkan kemandirian serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dinas Sosial memiliki banyak peran yang harus dipenuhi diantaranya dalam memberdayakan penyandang disabilitas.

Berikut adalah pembahasan terkait dengan peran Dinas Sosial Kota Gorontalo terhadap penyandang disabilitas di Kota Gorontalo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator teori peran dari Jim Ife, yaitu peran fasilitatif, peran edukatif, dan peran representasional sebagai tolak ukur.

Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Membangun kesepakatan dengan sesama pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat.

Menurut Jim Ife (2008) dalam peran fasilitatif terdapat tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negoisasi, pemberian dukungan, membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya dan mengorganisasi

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan peran fasilitator adalah upaya dari pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo dalam memfasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas seperti kebutuhan pelatihan dan kebutuhan sosial seperti sembako, uang dan kursi roda bagi penderita tuna daksa. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa, peran Dinas Sosial Kota Gorontalo sebagai fasilitator sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas baik dalam bantuan

yang bersifat jangka pendek seperti uang tunai dan sembako maupun bantuan yang bersifat jangka panjang seperti mengikutkan penyandang disabilitas dalam kegiatan pelatihan kemandirian.

Peran Edukatif

Pendidikan merupakan sesuatu yang esensial serta merupakan kegiaatan yang universal dalam kehidupan manusia. Dimanapun didunia ini terdapat masyarakat disana terdapat pula pendidikan. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang agar dapat berkembang secara maksimal. Hal ini mencakup seluruh aspek kepribadian manusia baik pengetahuan nilai maupun sikap serta keterampilannya. Pendidikan juga dinilai sebagai suatu kekuatan yang dapat menentukan prestasi dan produktivitas seseorang sehingga melalui pendidikan manusia dapat belajar menghadapi segala problematika yang ada demi mempertahankan kehidupannya. Pendidikan hakuikatnya akan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut kita laksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai. Maka dalam pelaksanaanya. Ketiga kegiatan tersebut harus berjalan secara terpadu dan berkelanjutan serta serasi dengan perkembangan peserta didik dan lingkungan hidupnya.

Dinas Sosial memainkan peran dalam penentuan agenda sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka penigkatan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi penyandang disabilitas. Peran pendidikan ini dapat dilakukan dengan meningkatan kesadaran, memberikan informasi, melakukan pelatihan terhadap penyandang disabilitas

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan peran edukatif adalah upaya dari pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa, peran Dinas Sosial Kota Gorontalo sebagai edukator sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan seperti mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas meskipun secara frekuensi masih rendah.

Refresentasional

Dinas Sosial melakukan interaksi dengan badan-badan dimasyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu-individu, kelompok- kelompok, dan masyarakat. Peranan ini dilakukan, antara lain dengan: mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi dengan berbagai perimbangan

yang matang, seperti bantuan modal usaha, pelatihan pengembangan potensi dari berbagai donator. Melakukan advokasi untuk membela kepentingan-kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat seperti mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut. Memanfaatkan media masa untuk memperkenalkan hasil produksi.

Selain itu juga bertujuan menerima dukungan dari pihak lain yang lebih luas; membuka jaringan kerja, dengan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak, kelompok dan berupaya mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya pengembangan potensi, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat' selain itu pula, Dinas Sosial berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan stakeholder.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan peran refresentasional adalah upaya dari pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo dalam mendapatkan sumber-sumber bantuan dari pihak luar untuk diberikan kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat diketahui bahwa peran Dinas Sosial Kota Gorontalo sebagai refrsentasional sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mendapatkan bantuan dari pihak luar seperti bantuan modal usaha, peralatan pembantu (kursi roda), kesempatan kerja, maupun bantuan berupa sembako.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo terhadap penyandang disabilitas di Kota Gorontalo sudah optimal. Peran sebagai fasilitator sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari bantuan yang diberikan baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Peran sebagai edukator sudah cukup baik. Hal ini terlihat pelatihan keterampilan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas. Peran sebagai refresentasional sudah cukup baik, dimana Dinas Sosial melakukan upaya mencari bantuan dari pihak luar untuk para penyandang disabilitas.

Saran;

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang peneliti tawarkan sebagai bahan pertimbangan;

1. Berkenaan dengan peran fasilitatif setiap indikator pendukung telah terpenuhi namun kurang maksimal. Dinas Sosial sebaiknya mendata penyandang disabilitas dengan merata. Selain itu Dinas Sosial harus memiliki Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang jelas berkaitan dengan setiap program dan bantuan yang mereka keluarkan.

2. Berkenaan dengan peran edukatif, peneliti memberikan saran agar setiap kegiatan yang dilaksanakan harus mencakup seluruh penyandang disabilitas di Kota Gorontalo, agar seluruh penyandang dapat menerima informasi, pelatihan dan edukasi yang diberikan. Selain itu Dinas Soisal juga harus memperjelas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan alasan pemilihan kegiatan pelatihan kepada penyandang disabilitas.
3. Saran yang peneliti berikan berkaitan dengan peran representative adalah agar Dinas Sosial bersama masyarakat luas turut membantu penyandang disabilitas yang mendapat perlakuan diskriminasi dari pihak lain, serta turut melakukan advokasi jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Jim Ife, (2008). Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Kurniawan, Beny. (2012). Metodologi Penelitian. Tangerang.Jelajah Nusa.

Poerwoko dan Totok. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.

Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta.Graha Ilmu.

Suhartini, dkk. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta. Pustaka Pesantren.

Suharto, Edi. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung. PT Refika Aditama.

Sugiono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.